Implementasi Penerapan SAK EMKM Pada UMKM Kuliner Di Kelurahan Sukapura Jakarta Utara

Hendrawati [1], Defania Ayu Pramesti Wibowo[2], Agustian Burdah[3], Asep Saefurahman[4], Merliyana[5]
[1,2,5] Program Studi Akuntansi, STIE Indonesia Jakarta
[3,4] Program Studi Manajemen, STIE Indonesia Jakarta
E-mail : Hendrawati@stei.ac.id, 11206000009@stei.ac.id, agustian_burda@stei.ac.id, asep.saefurahman@stei.ac.id, merliyana@stei.ac.id

Article History:
Received: 05 Oktober 2024
Revised: 25 Oktober 2024
Accepted: 30 Oktober 2024

Keywords: *UMKM, Laporan Keuangan, SAK EMKM*

Abstract: *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu jenis usaha yang saat ini berkembang pesat di Indonesia. Khususnya UMKM di bidang usaha perdagangan. UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Indonesia karena mampu mendorong dan meningkatkan perekonomian secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Mendukung perkembangan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah menerbitkan Standar Akuntansi Khusus Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang merupakan bentuk sederhana dari Standar Akuntansi Umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara langsung kepada 15 pelaku UMKM di kawasan Sukapura Jakarta Utara, yang bertujuan untuk mengetahui apakah UMKM di Sukapura Jakarta Utara sudah menerapkan SAK EMKM dalam pelaporan keuangannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap UMKM bidang usaha perdagangan di kawasan Sukapura Jakarta Utara, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh UMKM bidang usaha perdagangan di kawasan Sukapura Jakarta Utara masih sangat sederhana dan sederhana. tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusianya belum begitu paham tentang apa itu laporan keuangan dan SAK EMKM serta para pelaku UMKM belum paham apa itu laporan keuangan untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran usahanya, yang mereka tahu hanya mencari keuntungan saja, tidak memperhitungkan. biaya-biaya lain dan pajakpajak yang timbul. diterima dan pencatatan akuntansi berdasarkan SAK EMKM tidak terlaksana karena tidak adanya*

pengawasan dari pihak yang berkepentingan. Penerapan laporan keuangan sesuai SAK EMKM menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari tiga komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu maupun kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang ada. Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak terlepas dari aktivitas akuntansi yang sangat berguna untuk menunjukkan perkembangan atau kondisi keuangan sehingga kelangsungan hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat terekam dan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Entitas yang memenuhi persyaratan menggunakan SAK EMKM ini tetap perlu mempertimbangkan apakah ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM ini telah sesuai dan memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan yang akan diterapkan, apakah berdasarkan SAK EMKM atau SAK lainnya, dengan memperhatikan kemudahan yang ditawarkan dalam SAK EMKM, dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas tersebut (Widiastiawati & Hambali, 2020).

Perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan dan keamanan dalam setiap transaksi. Masyarakat Indonesia yang dulunya banyak berbelanja dengan uang tunai, saat ini telah mengetahui dan memanfaatkan pembayaran menggunakan metode non tunai, yaitu pembayaran digital sebagai alat pembayaran. sistem pembayaran digital seperti ovo, shopeepay, qris dan gopay. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaran non tunai yang yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri (Amani, 2018).

Dalam penelitian (Syahrenny et al., 2021) menyimpulkan bahwa *Food City* Pasar Segar yang berada di Kota Makasar dalam menyusun laporan keuangannya belum menerapkan SAK

EMKM dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari instansi, latar belakang pendidikan dan kurangnya pengetahuan dari pemilik UMKM.

UMKM merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik karena UMKM belum memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak diwajibkan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal menjadi dasar bahwa UMKM tidak perlu untuk menggunakan PSAK. Namun, perkembangannya, kegiatan UMKM mengalami perluasan dan peningkatan yang kemudian melibatkan pihak eksternal misalnya kreditur dan supplier. Oleh karena beragamnya pemakai/pengguna yang memiliki kepentingan, maka diperlukan adanya suatu standar dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para pengguna dalam memahami laporan keuangan yang dapat membantu perusahaan kecil menengah dalam menyediakan pelaporan keuangan yang relevan dan andal sehingga pihak eksternal dengan mudah mengakses informasi keuangan perusahaan (Amani, 2018).

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri. Kriteria Usaha Mikro yang baru adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 2.000.000.000

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang PP UMKM. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000 sampai paling banyak Rp. 15.000.000.000

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang PP UMKM. Kriteria Usaha Menengah sebagai berikut:

1. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (Kalsum et al., 2021).

Pelaku usaha yang terdaftar di *Food City* Pasar Segar Kota Makassar sebagai wadah dan atau tempat berkumpulnya pelaku UMKM yang khusus menjalankan usaha bidang makanan dan

minuman seharusnya membuat Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Namun berdasarkan pengamatan peneliti, fenomena yang terjadi, pelaku usaha yang terdaftar di *Food City* Pasar Segar Kota Makassar, khususnya kedai *Fish n Friends* dan kedai sate Taichan Uncle Katsu menyusun laporan keuangan dalam bentuk sederhana yang terdiri dari pengurangan antara pemasukan dan pengeluaran untuk mengetahui laba usaha. Kedua kedai ini melakukan pembukuan dan pencatatan secara manual berdasarkan transaksi yang terjadi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan masih sangat sederhana. Pemilik usaha menginginkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai sistem dan standar yang berlaku, agar usahanya dapat berkembang melalui pinjaman dari investor (Kalsum et al., 2021).

Kajian Teori

Teori Akuntansi Positif/Deskriptif

Teori akuntansi merupakan suatu usaha coba-coba untuk membenarkan apa yang tersusun melalui praktik akuntansi. Teori ini disebut dengan teori akuntansi deskriptif. Dengan menggunakan teori akuntansi deskriptif menimbulkan lahirnya teori akuntansi normatif menurut para pendukung teori akuntansi deskriptif. Prinsip dari teori akuntansi normatif adalah membuat benar apa yang sepantasnya memang benar dibanding membenarkan yang tidak benar (Basriyani et al., 2023).

Teori Akuntansi Normatif

Perubahan teori normatif selanjutnya yaitu sejak dipakainya pendekatan pengusutan runtut resmi, yakni pendekatan deduktif. Tidak cuma itu kelanjutan akuntansi juga menghadap pada teori akuntansi positif ataupun deskriptif di mana penyelidikannya lebih runtut mengenakan pendekatan induktif. Bermacam teori positif ataupun deskriptif bertumbuh sangat deras pada akuntansi. Berkembangnya teori menghadap kepada teori positif (deskriptif) diikuti bersama transformasi fokus pada akuntansi yang dimanfaatkan oleh norma akuntansi, seperti *Financial Accounting Standards Board* (FASB) menegaskan dalam keuntungan pada pengumpulan ketentuan serta tak lagi terpusat oleh asumsi (Amani, 2018).

Akuntansi

Akuntansi (*accountancy*) adalah suatu metodologi dan sekumpulan pengetahuan yang berhubungan dengan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomi bagaimanapun bentuknya, terbagi menjadi dua bagian. Pertama, accounting merupakan sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan proses terlaksananya pembukuan dalam arti yang luas. Kedua, auditing merupakan sebuah pengetahuan atau ilmu yang berhubungan dengan suatu pemeriksaan dan menilai (evaluasi) atas hasil dari proses dari pembukuan tersebut. Karna, nama akuntansi (*accountancy)* lebih lebar meliputi bidang teori, proses pembukuan, penerapan atau praktik, serta pemeriksaan dan penilaian. Sedangkan istilah accounting hanya menunjukan bidang teori (Basriyani et al., 2023).

Laporan Keuangan

Munawir mengatakan, “Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada posisi ini sudah menjadi kebiasaan penambahan daftar ketiga (daftar surplus). Daftar ketiga yaitu daftar surplus atau kemungkinan

terjadi defisit, biasanya disajikan dalam laporan perubahan modal". Menurut pendapat Ikatan Akuntansi Indonesia (1999: 2): "Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan rugi laba, pelaporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, laporan arus kas atau laporan arus dana). Catatan dan laporan lain keuangan disamping itu juga termasuk schedul dan informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga" (Lisa et al., 2020).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

SAK merupakan suatu standar maupun aturan baku yang harus diterapkan oleh seorang Akuntan dalam menjalankan pekerjaannya, dimana standar tersebut telah disusun oleh lembaga yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar yang ada di Indonesia saat ini merupakan hasil dari perubahan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu salah satunya dengan mengadopsi Standar Akuntansi Internasional atau biasa disebut *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Sejarah mengemukakan bahwa pada tahun kemerdekaan yaitu 1945, Indonesia masih menggunakan *Sound Business Practices,* yaitu standar yang dibuat oleh negara Belanda. Standar tersebut diimplementasikan dalam rentang waktu antara tahun 1945 hingga 1955 dikarenakan pada masa itu Indonesia belum memiliki standar Akuntansi tersendiri. IAI di tahun 1973 membentuk suatu komite bernama Prinsip Akuntansi

Kerangka Berfikir

Penelitian ini dimulai dari rasa keingintahuan tentang pentingnya penerapan pencatatan laporan keuangan pada umkm sesuai SAK EMKM.

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu: 1. Usaha Mikro Jika mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dan mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). 2. Usaha Kecil Jika mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dan mempunyai hasil penjualaan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah Jika mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dan mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari siklus akuntansi dari pencatatan sampai penyusunan laporan keuangan. Menurut PSAK 1 laporan keuangan menghasilkan laporan posisi keuangan

(neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:8) laporan keuangan entitas minimum terdiri dari:

a. Laporan posisi keuangan.
b. Laporan laba rugi.
c. catatan atas laporan keuangan.

Tujuan Laporan Keuangan

a. Memperlihatkan informasi tentang kekyaan dan kewajiban suatu usaha.
b. Memberikan informasi tentang pertumbuhan laba bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
c. Memberikan informasi yang dapat menjelaskan pengguna untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.
d. Memberikan Informasi yang relevan untuk pengguna laporan keuangan.

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:7) paragraph 3.3, penyajian dalam laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Relevan Yaitu informasi laporan keuangan dapat digunakan pemakai untuk pengambilan keputusan.
2. Representasi tepat Yaitu informasi dalam laporan keuangan dibuat secara tepat bebas dari kesalahan material dan bias.
3. Keterbandingan Yaitu informasi dalam laporan keuangan yang dapat digunakan untuk membandingkan dan mengevaluasi antar periode sehingga dapat melihat posisi dan kinerja keuangan.
4. Keterpahaman Yaitu informasi dalam laporan keuangan yang dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna laporan keuangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian kualitatif ini bukanlah suatu penelitian yang menggunakan data berupa angka melainkan mengumpulkan data dan menganalisis data yang sifatnya naratif. Jenis penelitian kualitatif ini juga merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawan eksperimennya, dimana peneliti yang merupakan eksperimen kunci dengan analisis data bersifat induktif dan mempunyai hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi yang merupakan proses penalaran yang bertolak dari individu menuju kumpulan umum (Yunianti et al., 2023).

Penelitian kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata – kata atau lisan yang disadari oleh seseorang atau juga perilaku yang diamati. Pendeketannya itu diarahkan dan difokuskan pada latar dan juga individu secara *holistic* (utuh).

Dengan demikian peneliti tidak melakukan proses isolasi pada objek penelitian kedalam *variabel* atau *hipotesis*. Tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Untuk tahap analisis disini, yang peneliti lakukan ialah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk peneliti dapat mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan, peneliti menggunakan beberapa tahap:

1. Membuat dan menyusun draft pertanyaan untuk wawancara berdasarkan dari unsur – unsur kredibilitas yang akan ditanyakan kepada informan.
2. Melakukan wawancara secara langsung dengan informan.

3. Mengumpulkan dokumentasi selama wawancara untuk melengkapi data – data yang berhubungan dengan penelitian.
4. Memindahkan data penelitian yang masih berbentuk draft semua pertanyaan yang diajukan kepada informan.
5. Menganalisis hasil data dan wawancara yang telah dilakukan.

Metode deskripsi kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, kompleksitas, dan dinamika dari fenomena yang diamati dengan lebih baik daripada metode kuantitatif yang hanya berfokus pada angka dan statistik. Ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan pemahaman yang lebih luas tentang subjek penelitian.

Populasi adalah kelurahan generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan juga karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan dibuat kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah pelakum UMKM yang sudah mendirikan usahanya lebih dari atas samadengan 3 tahun dan telah memiliki lebih dari 2 cabang di kelurahan kelurahan Sukapura, Kelapa Gading.

Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dapat memberikan keterangan langsung atau data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk fokus terhadap pelaku UMKM di kelurahan Sukapura, Kelapa Gading dengan demikian sampel pada penelitian ini yaitu para pelaku UMKM, namun pada penelitian ini tidak semua sample merupakan pemilik langsung UMKM adapun karyawan dari UMKM tersebut.

Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data adalah peroses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan sebuah data kedalam kategori, menjabarkan, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan agar mempermudah diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan berbicara proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai. Sebelum peneliti masuk kekelurahan objek penelitian maka sebelumnya peneliti menyiapkan data-data studi pendahuluan atau data sekunder untuk menentukan fokus penelitian. Kemudian selama dilapangan peneliti harus menganalisis setiap orang yang diwawancarai dan dapat mengambil kesimpulan, jika data belum valid, maka peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Hasil Penelitian Implementasi Penerapan SAK EMKM pada Laporan Keuangan UMKM

Analisis Implementasi Penerapan SAK EMKM disini peneliti menggunakan metode wawancara langsung dengan menggunakan kertas kuisioner yang berisikan pertanyaan – pertanyaan mengenai pengetahuan dari para pelaku UMKM terhadap Dasar Akuntansi dan juga SAK EMKM. Dalam kuisioner ini peneliti menggunakan skala penilaian dengan pilihan jawaban dari Sangat Tidak Setuju (STS) sampai dengan Sangat Setuju (SS). **Tabel 1 Kuisioner**

Sangat Tidak Setuju	STS
Tidak Setuju	TS
Cukup Setuju	CS

Setuju	S
Sangat Setuju	SS

Data para pelaku UMKM yang peneliti lakukan wawancara Pada saat peneliti melakukan observasi dikelurahan kelurahan Sukapura untuk mencari pelaku UMKM yang memenuhi kriteria dan dapat peneliti wawancarai, peneliti menemukan banyak pelaku UMKM yang ada di kelurahan kelurahan Sukapura namun masih belum banyak yang memenuhi kriteria yang peneliti inginkan.

Tabel 2. Para Pelaku Umkm

Nama	Jenis Kelamin	Usia	Nama Usaha	Lama Usaha	Omset/bulan
Yuni	Wanita	35 Tahun	Ayam Geprek Teh Yuni & Teh Solo	4 Tahun	14.000.000,00
Aldi	Pria	26 Tahun	Gyoza ++	3 Tahun	15.500.000,00
Yani	Wanita	40 Tahun	Rujak Jambu Kristal & Teh Tarik Flamboyan	4 Tahun	18.600.000,00
Asep Julianto / Akmal Naufal	Pria	24 Tahun	Ropita Aci Gading	21 Tahun	31.000.000,00
Iwan	Pria	26 Tahun	Tahu Crispy	3 Tahun	9.300.000,00
Agus	Pria	41 Tahun	Dimsum Loemayan & Nasi Bakar Loemayan	3 Tahun	10.250.000,00
Sri Melani	Wanita	30 Tahun	Fried Chicken Sri Melani	3 Tahun	10.000.000,00
Makmun	Pria	40 Tahun	Martabak Manis Bangka	15 Tahun	17.000.000,00
Imam	Pria	26 Tahun	Cafe Upala	3 Tahun	150.000.000,00
Dedi	Pria	30 Tahun	Friend Kebab	3 Tahun	10.000.000,00
Nur	Wanita	29 Tahun	Pisang Crispy	3 Tahun	9.300.000,00
Rika	Wanita	28 Tahun	Warung Sunda Rasa	3 Tahun	9.000.000,00
Rian	Pria	30 Tahun	Bakso Bakar	3 Tahun	9.000.000,00
Taufik	Pria	32 Tahun	Minion Dimsum	7 Tahun	10.500.000,00
Tegar	Pria	26 Tahun	Cakwe 03	7 Tahun	10.000.000,00

Dengan dibuatnya tabel data para pelaku UMKM pada tabel diatas, terlihat bahwa masih terdapat banyak pelaku UMKM yang masih tidak memahami apa itu pencatatan laporan keuangan dan juga SAK EMKM, mereka masih menggunakan pencatatan biasa untuk melakukan pencatatan keuangan mereka, dengan hanya mencatat uang masuk dan uang keluar serta modal awal pada saat membuka usaha UMKM tersebut. Cara perhitungannya pun masih dapat dibilang sederhana dengan menghitung pemasukan dan pengeluaran serta dikurang dengan modal yang akan digunakan kembali untuk membeli alat dan bahan untuk usaha mereka.

Berdasarkan pengamatan dilapangan menyatakan hasil bahwa rata – rata para pelaku UMKM dikelurahan Kelurahan Sukapura masih membuat laporan keuangannya yang hanya berisikan pencatatan uang masuk dan uang keluar dari usahanya saja. Laporan yang dibuat oleh para pelaku UMKM masih sangat sederhana dan masih belum sesuai penerapannya dengan SAK EMKM yang dimana pada SAK EMKM menjelaskan bahwa ada tiga komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan adanya pemisahan antara asset lancar dan asset tetap, liabilitas dan ekuitas sedangkan pada laporan laba rugi adanya pemisahan pendapatan, beban dan pajak penghasilan.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang sebelumnya peneliti sudah singgung bahwa pencatatan yang dilakukan oleh 15 pelaku UMKM di kelurahan kelurahan Sukapura ini masih sangat sederhana dimana pencatatan penyusunan laporan pembukuan masih belum sesuai dengan ilmu akuntansi, karena pencatatan yang dilakukan tidak menunjukan tahap – tahap seperti apa yang ada pada siklus akuntansi dan pencatatan hanya dapat dipahami oleh pemilik UMKM itu sendiri.

Pembahasan Implementasi penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan UMKM di bidang usaha dagang yang ada di kelurahan Jakarta Utara

Para pelaku UMKM di kelurahan kelurahan Sukapura adalah para pelaku usaha yang mendirikan usahanya di sekitaran jalan kelurahan Sukapura, dengan berbagai macam usaha dari makanan ringan hingga makanan berat dan minuman yang kekinian, dalam penelitian ini diambil kriteria untuk para pelaku UMKM yang sudah mendirikan usahanya selama 3 tahun atau lebih, yang memungkinkan mereka sudah memiliki pencatatan laporan keuangan yang baik dalam menjalankan usaha mereka. Tata cara pencatatan dari para pelaku UMKM masih dilakukan dengan mencatat pemasukan dan pengeluarannya saja.

Para pelaku UMKM sebenarnya sudah sedikit mengetahui kalau pencatatan keuangan itu adalah suatu hal yang penting, namun berdasarkan wawancara kepada para pelaku UMKM kurangnya literasi dan sumber daya manusia dalam hal penyusunan laporan keuangan dan pemahaman atas dasar – dasar akuntansi menjadikan para pelaku UMKM tidak dapat melakukan dan membuat penyusunan laporan keuangan dan juga belum berbasis dengan SAK EMKM, menjadikan mereka para pelaku UMKM hanya membuat catatan atas laporan pemasukan dan juga pengeluaran yang terjadi pada saat itu juga, dan direkap setiap bulannya.

Pada sistem akutansi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM masih belum dilakukan secara otomatis melalui aplikasi ataupun membuat data pada Microsoft Excel, yang peneliti dapati pada saat melakukan wawancara terhadap salah satu Informan No. 14 menceritakan bahwa,:

“kalau untuk pencatatan keuangan dikita sih masih pakai manual ya mbak, masih mencatat jika ada uang masuk itu dicatat berapa, kalo ada uang keluar dicatat berapa, sesuai dengan uang yang kita dapat dan kita keluarin si mbak, kalau untuk aplikasi kita masih belum kepikiran untuk memakai itu soalnya, kita juga masih belum ada orang untuk pegang hal yang seperti itu, jadi kita masih pakai yang biasa – biasa aja mbak untuk catat hal – hal keuangan seperti itu”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakanl hasil bahwa rata – rata para pelaku UMKM di kelurahan kelurahan Sukapura ini masih belum membuat dan menyusun laporan keuangannya dengan baik yang sesuai dengan dasar pembuatan laporan keuangan.

Dasar – dasar akuntansi dalam melakukan pencatatan, pengelompokan dan peringkasan transaksi dalam kegiatan usahanya yang mana nanti hasilnya akhirnya dapat berupa terciptanya sebuah informasi mengenai seluruh aktivitas keuangan dalam bentuk laporan keuangan, para pelaku UMKM dalam hal ini "cukup setuju" mengetahui untuk membuat laporan keuangan diperlukan perlakuan akuntansi yang dimulai dari pencatatan, pengelompokan dan peringkasan transaksi yang terjadi pada usaha mereka.

Informan No. 1 mengatakan bahwa, "*kalau untuk itu saya cukup setuju mbak, kan memang kalau dalam berusaha harus ada catatan untuk tiap transaksinya gitu ya mbak"*

Informan No. 8 *juga mengatakan bahwa, "kalau dari saya sih setuju ya mbak, pencatatan atas transaksi yang terjadi itu penting mba, soalnya kan kalau kita ingin mengetahui usaha kita ini untung apa rugi nya kan melalui pencatatan itu, kalau itu tidak ada pencatatannya seperti itu nanti kita mau lihat kalau kita ini untung apa ruginya dari mana, kalau hanya dari pemasukan saja kan itu masih tidak bisa dibilang untuk ya mbak, karena kan masih ada yang harus dikeluarin lagi biaya – biaya seperti untuk kebersihan trus juga kemanan, dan juga buat pembayaran gaji karyawan dan modal kembali itu harus diperhitungkan mbak, jadi kalau untuk pencatatan seperti itu untuk laporan keuangan menurut saya itu setuju mbak dan penting juga untuk diperhatikan dalam menjalankan usaha"*

Dasar akuntansi mengenai pencatatan transaksi untuk membuat laporan keuangan itu memang hal yang harus diperhatikan kembali dalam menjalankan sebuah usaha baik itu usaha besar maupun usaha yang masih dalam tahap pengembangan. Dari dua penjelasan yang dijelaskan oleh Informan No. 1 dan No. 8 mengenai pencatatan transaksi untuk membuat laporan keuangan peneliti dapat mengambil hasil bahwa hal tersebut penting dalam menjalankan sebuah usaha, dari perspektif informan kita bisa menilai bahwa informan menyetujui kalau pencatatan transaksi tersebut memang harus dilakukan, walaupun nyatanya yang peneliti lihat pada saat observasi dan wawancara informan pun masih belum melakukan pencatatan transaksi yang sesuai dengan dasar akuntansi dan juga SAK EMKM, dan beliau hanya melakukan pencatatan seperti pemasukan dan pengeluarannya saja, serta modal untuk selanjutnya.

Berdasarkan dari jawaban Informan No. 8 mengenai pencatatan transaksi untuk membuat laporan keuangan, informan sendiri setuju dengan hal tersebut, beliau menjelaskan bahwa sangatlah penting bagi suatu pengusaha membuat pencatatan atas transaksi yang terjadi dan melakukan penyusunan laporan keuangannya, karena dengan dilakukannya hal tersebut maka pemilik usaha akan dapat mengetahui rincian laporan keuangannya setiap bulan dan juga dapat menghitung besar keuntungan dan beban apa saja yang dikeluarkan dalam 1 bulan. Dengan begitu peneliti mengambil kesimpulan bahwa para pelaku UMKM sudah cukup setuju dengan pernyataan bahwa akuntansi adalah ilmu dalam melakukan pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi keuangan dan kegiatan-kegiatan usaha yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi mengenai seluruh aktivitas keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah pada UMKM di Kelurahan Jakarta Utara

Dengan hasil tersebut dapat kita ketahui para pelaku UMKM sudah ada kesadaran akan pentingnya penerapan akuntansi dalam mengelola UMKM mereka, menjadikan penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM dapat dilakukan kepada para pelaku UMKM di kelurahan kelurahan

Sukapura. Dalam akuntansi maksud dan tujuannya itu adalah untuk mencatat dan memberikan informasi secara akurat kepada pemilik UMKM dan pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini ada beberapa factor yang membuat para pelaku UMKM tidak mencatat laporan keuangan menurut SAK EMKM. Pertama, ada beberapa yang masih kurang mengerti akan pernyataan tersebut, dikarenakan mereka juga masih belum membuat dan menyusun laporan keuangan UMKM mereka dan laporan keuangan yang dibuat oleh para pelaku UMKM tersebut hanya dapat dimengerti oleh pemilik UMKM saja, karena pencatatan yang mereka lakukan masih belum sesuai dengan dasar akuntansi, jadi tidak ada laporan keuangan yang akurat untuk pemilik UMKM tersebut dan juga untuk pihak lain yang berkepentingan.

Laporan keuangan itu merupakan suatu rangkuman atau juga ringkasan dari semua transaksi/kegiatan usaha yang telah terjadi, pernyataan ini untuk para pelaku UMKM di kelurahan kelurahan Sukapura masih banyak yang belum tahu akan hal ini, seperti jawaban dari Informan No. 10 yang membuka usaha Pisang Crispy

"aduh maaf mbak kalau soal itu saya juga kurang paham, soalnya saya juga tidak ada waktu untuk belajar hal – hal seperti itu mbak, yang penting mah saya ada untungnya aja gitu mbak, kalau untuk pencatatannya saya hanya mencatat yang biasa saja mbak misalnya itu catat modal awal berapa, terus pengeluarannya apa aja, pemasukannya berapa lalu habis itu tinggal dihitung untungnya berapa, seperti itu saja si mbak yang saya lakukan"

Berdasarkan yang dijelaskan oleh Informan No. 10, terdapat faktor kedua yaitu terdapat pelaku UMKM yang tidak mengerti apa itu laporan keuangan untuk mengelola pendapatan dan beban usaha mereka, yang merekah ketahui hanya mendapatkan untungnya saja, tidak memperhitungkan beban lain dan pajak yang diterima.

Laporan keuangan juga dibutuhkan jika pemilik UMKM ingin mengajukan kredit kepada bank atau juga pemberi kredit lainnya. Para pelaku UMKM masih belum mengetahui akan hal tersebut, bagi para pelaku UMKM tidaklah masalah untuk hal tersebut dikarenakan mereka masih belum ada niatan untuk melakukan kredit pada bank ataupun juga pemberi kredit lainnya. Mereka mencari sesuatu yang mudah saja dengan menggunakan tabungan yang ada atau pun mereka menabung dahulu kalau ingin memperbesar usahanya. Mereka juga mengatakan bahwa menurut mereka hal – hal seperti itu sedikit ribet dan terlalu banyak prosesnya, mereka mencari kemudahan dalam usaha mereka maka dari itu mereka tidak memikirkan untuk membuat laporan keuangan yang hal tersebut untuk mereka terlalu susah dilakukan.

Ketiga, pencatatan akuntansi berbasis SAK EMKM tidak dilakukan disebabkan pula karena tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan UMKM terutama dari pihak pemerintah dan lembaga terkait. Padahal kepedulian terhadap pengembangan UMKM sudah semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak sesuai dengan bidang yang digelutinya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prasanti & Sapta, 2021) bahwa UMKM Ai Your Lash Beauty Salon Kota Metro tidak melakukan pencatatan laporan keuangan usahanya sesuai dengan SAK EMKM karena tidak adanya pengawasan dari pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan UMKM stakeholder yakni dari pihak pemerintah, lembaga-lembaga terkait dan regulator.

Sebenarnya juga membuat laporan keuangan tidaklah sesulit apa yang para pelaku UMKM katakan sebelumnya, dan membuat laporan keuangan itu dapat menjadikan keuangan dari usaha menjadi lebih akurat dan sebagai pemilik UMKM dapat menyusun strategi untuk usaha kedepannya untuk bagaimana dapat menghasil yang lebih dari sebelumnya. Dapat dilihat perkembangan usahanya melalui laporan keuangan yang dibuat apakah dalam bulan ke bulan mendapat keuntungan yang signifikan atau malah sebaliknya usaha tersebut mengalami

penurunan tiap bulannya. Maka dengan setelah dilihat hasil dari laporan keuangannya menjadikan para pelaku UMKM tahu apa yang harus dilakukan kedepannya untuk membuat usaha mereka mendapat hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

Kesimpulan

1. Para pelaku UMKM di daerah kelurahan Sukapura tidak melakukan pencatatan laporan keuangan usahanya sesuai dengan SAK EMKM.
2. Beberapa kendala yang dialami para pelaku UMKM di kelurahan Sukapura Jakarta Utara. Pertama, kurangnya pemahaman dalam membuat dan menyusun laporan keuangan. Kedua, pelaku umkm tidak melakukan pencatatan pendapatan dan beban secara terpisah. Ketiga, tidak adanya pengawasan dari pihak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan umkm yakni dari pemerintah atau lembaga terkait.

Saran

1. Bagi para pelaku UMKM sebaiknya banyak mengikuti workshop mengenai pencatatan laporan keuangan SAK EMKM agar mampu mengevaluasi keuangan usaha dan terus berkembang. Setelah itu, dapat mencari karyawan yang bisa dalam hal akuntansi, dan dapat melakukan pencatatan dan pembukuan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM untuk mengolah keuangan usahanya supaya dapat mengetahui kinerja dan posisi keuangan dari usahanya, dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat untuk dijadikan dasar pengambila keputusan ekonomi usaha mereka
2. Para pelaku UMKM seharusnya dapat membuat laporan keuangan yang sederhananya saja yang penting masih sesuai dengan peraturan SAK EMKM yang berlaku, dengan melakukan setiap pencatatan transaksi dan dilajutkan dengan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Dengan seperti itu dapat membantu para pelaku UMKM mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi.

Daftar Referensi

Amani. (2018). Penerapan SAK-EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, *2*(2), 12–30. https://doi.org/10.30741/assets.v2i2.266

Basriyani, Panggabean, & Tanjung. (2023). Akuntansi Syariah: Konsep, Historis dan Implementasi. *Kapital Deli Sumatera*. https://jurnal.unds.ac.id/index.php/kds/article/view/265

Kalsum, Ikhtiari, & Dwiyanti. (2021). PENERAPAN SAK EMKM DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN UMKM DI FOOD CITY PASAR SEGAR KOTA MAKASSAR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, *3*(2), 92–103. https://doi.org/10.35326/jiam.v3i2.986

Lisa, Fitriani, Rahman, Shinta, & Ayudhi. (2020). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) pada Umkm di Kota Padang. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, *15*(1), 1–15. https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i1.17

Prasanti, & Sapta. (2021). ANALISIS PENERAPAN PENCATATAN KEUANGAN BERBASIS SAK EMKM PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) AI YOUR LASH BEAUTY SALON KOTA METRO. *E-Prints Ummetro*. https://eprints.ummetro.ac.id/714/

Syahrenny, Kusmaeni, & Fitria. (2021). SISTEM AKUNTANSI UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA UMKM DI SURABAYA. *Jurnal Abdikarya*.

Widiastiawati, & Hambali. (2020). PENERAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA UMKM UD SARI BUNGA. *Journal Of Accounting, Finance And Auditing*, *2*(2). https://jurnal.faperta-unras.ac.id/index.php/JS/article/view/99

Yunianti, Mahanani, & Retnoningsih. (2023). ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA UMKM DI KABUPATEN BATANG. *Journal of Accounting and Finance*, *2*(1). https://doi.org/10.31942/jafin.v2i1.8272